

**ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*
TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PEREKONOMIAN
DI KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

**Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi
Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**



NAMA : DANU HARIADI

NIM : S4209123

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2011**

Halaman Persetujuan Pembimbing

**ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PEREKONOMIAN
DI KABUPATEN SRAGEN**

Disusun Oleh :
DANU HARIADI
S 4209123

Telah disetujui oleh Pembimbing :
Pada tanggal : Oktober 2011

Pembimbing I



Dr. Agustinus Suryantoro, M.S.
NIP. 19590901 198702 1 001

Pembimbing II



Drs. Supriyono, M.Si.
NIP. 19600221 198601 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 19510701 198010 1 001

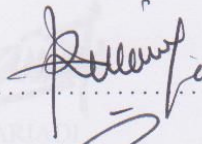


commit to user

Halaman Persetujuan Pembimbing

**ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PEREKONOMIAN
DI KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh :
DANU HARIADI
S4209123

Telah disetujui oleh Penguji
Pada tanggal : Oktober 2011

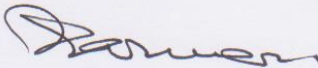
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Evi Gravitiani, SE, M.Si	
Pembimbing Utama	<u>Dr. Agustinus Suryantoro, M.S.</u>	
Pembimbing Pendamping	<u>Drs. Supriyono, M.Si.</u>	

Mengetahui:
Direktur PPs UNS



Prof. Dr. Suranto, M.Sc., PhD
NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. J.J. Sarungu, M.S
NIP. 19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DANU HARIADI

NIM : S4209123

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi SDM

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, Agustus 2011



Tertanda,

DANU HARIADI

MOTTO

“Arti dari hidup adalah ada dimana didalam kehidupan memberikan sebuah arti “
“Selalu berusaha atas dasar keyakinan dan beriman terhadap tujuan“



PERSEMBAHAN



Karya ini dipersembahkan untuk:

- ✓ Masyarakat IT khususnya yang konsen pada Pemerintahan, sehingga IT yang dibangun berguna bagi sebesar-besarnya untuk masyarakat
- ✓ Komunitas IT di Kabupaten Sragen, khususnya Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen
- ✓ Almamaterku
- ✓ Istriku tercinta Sri Indah Pariningsih dan Anakku Lintang Vikhasri Putri Hariadi
- ✓ Kedua Orang Tua dan mertuaku tercinta Drs. H. Kardiman dan Hj. Salimah serta AKP. Widayat Saini dan Ibu Pariningsih

commit to user

ABSTRAKSI

ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SRAGEN

**Danu Hariadi
Nim. 4209123**

**Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**

Kemajuan teknologi informasi dengan melihat segala potensinya untuk memanfaatkan lebih jauh, tuntutan akan agar pelayanan birokrasi yang lebih baik, akuntabel, cepat dan memuaskan mendorong pemerintah untuk digunakan dalam membantu proses penyediaan Teknologi Informasi. Dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 merupakan tonggak awal penggunaan Teknologi Informasi dalam skala nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen menindaklanjutinya dengan membuat Rencana Strategis Pembangunan Teknologi Informasi pada Tahun 2006-2010, hal tersebut merupakan salah satu kerangka untuk pembangunan daerah.

Penerapan tersebut dapat dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sragen dijadikan sebagai kabupaten percontohan dalam pengembangan e-Government. Implementasi e-Government tentu tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai.

Hasil penelitian ini sebagai kesimpulan dengan hasil pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sragen, ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap populasi layanan di Kabupaten Sragen, dan ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap jumlah investasi di Sragen.

Kemajuan teknologi yang cepat perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Kabupaten Sragen. Pembaruan infrastruktur sesuai dengan perubahan zaman mutlak diperlukan untuk menjaga kontinuitas informasi dan komunikasi. Tidak hanya infrastruktur, sumber daya kemampuan manusia sesuai dengan kemajuan teknologi juga perlu memiliki. Sehingga pelatihan berkala harus terus dilakukan jika ada teknologi baru baru, sehingga layanan dapat ditingkatkan lagi populasi. Implementasi e-Government di Sragen, itu akan optimal jika muatan pada unit kerja tunggal yang hanya terfokus pada pengembangan eGovernment adalah Electronic Data Management Office masih memiliki beban kerja luar pengembangan e-government.

Kata Kunci: e-Gov investasi, PDB, populasi layanan, Investor

ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT POPULATION OF SERVICE AND ECONOMY IN THE SRAGEN REGENCY

Danu Hariadi

S 4209123

*Master Program in Economics and Development Studies
Concentration: Human Resources and Economic Development*

Advances in technology are so rapid and its potential to be exploited, supported the need for better service bureaucracy, accountable, quick and satisfying to encourage governments to use in assisting the process of the provision of IT countries. Issuance of Presidential Instruction No. 3 of 2003 is a milestone early use of IT in the national scale. Sragen governments follow up by making the Strategic Development Plan for Information Technology Systems Sragen Regency Year 2006-2010 as a framework for regional development.

In the implementation that can be said to succeed, maketh evident from Sragen as pilot districts in the development of e-Government. Implementation of e-Government certainly can not be done without careful planning and adequate resources.

Result of this research came to the conclusion with the results of any effect the implementation of e-Gov investments of GDP in Sragen, there is the influence of the implementation of e-Gov investments affect the service population in Sragen regency, and there is the influence of the implementation of e-Gov investments affect the amount of investment in Sragen .

Rapid technological advances need to be considered specifically by the Sragen Regency. Rejuvenation of infrastructure in accordance with the changing times is absolutely necessary to maintain continuity of information and communication. Not only the infrastructure, human resource capability in accordance with technological progress also needs to have. So that periodic training should continue to be made if there is a new emerging technology, so that services can be improved again population. Implementation of e-Government in Sragen, it would be optimal if the charge on a single work units that are only focused on the development of eGovernment is Electronic Data Management Office still has the burden of work outside of the development of e-government.

Keyword: e-Gov investments, GDP, service population, Investor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul :” **Analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Perekonomian Dan Pelayanan Masyarakat Di Kabupaten Sragen**” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Tesis ini merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam situasi dunia nyata. Dalam hal ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi Tesis ini ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini.

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. J.J. Sarungu, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
2. Dr. Agustinus Suryantoro, M.S., selaku dosen pembimbing pertama yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
3. Drs. Supriyono, M.Si, selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu dan memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Selurruh jajaran sekretariat Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret yang telah perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

commit to user

5. Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen yang telah memberikan kelonggaran waktu dan tempat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen, khusus untuk anak-anakku di Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
7. Teman-teman kuliah khususnya yang telah memberikan dukungan, semangat serta sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama bekerja dan kuliah di Universitas Sebelas Maret.
8. Istri tercinta Sri Indah Pariningsih dan anaku Lintang Vikhasri Putri Hariadi yang kukasihi yang turut memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Kedua orang tuaku, Drs. H. Kardiman dan Hj. Salimah, serta bapak dan ibu mertua, AKP. Widayat Saini dan Ibu Pariningsih.

Semoga amal yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sragen Agustus 2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	
1. Pelayanan Publik	16
2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik	19
a. Kebijakan Publik	19
b. Evaluasi Kebijakan	21
c. Implementasi Kebijakan	24
3. Electronic Government (e-Gov)	24
4. Teknologi Informasi	41
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	43
6. Kualitas Pelayanan	46

a. Pengertian Pelayanan	46
b. Manajemen Kualitas Pelayanan	49
7. Investasi	52
B. Kerangka Pemikiran	54
C. HIPOTESA	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	59
B. Unit Analisis	59
C. Lokasi Penelitian	59
D. Sumber Data	60
E. Definisi Operasional	61
F. Teknik Analisis Data	62
1. Analisis Regresi Linier	62
a. Uji Statistik “t”	62
b. Uji Statistik F	63
c. Koefisien Determinasi (R^2)	63
2. Uji Asumsi Klasik	63
a. Multikolinieritas	64
b. Heteroskedastisitas	64
c. Autokorelasi	65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen	66
1. Kondisi Geografis	66
2. Kependudukan	67
3. Visi dan Misi Kabupaten Sragen	71
B. Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen	72
1. Struktur Organisasi	74
2. Tugas Dan Fungsi	75
a. Tugas	75

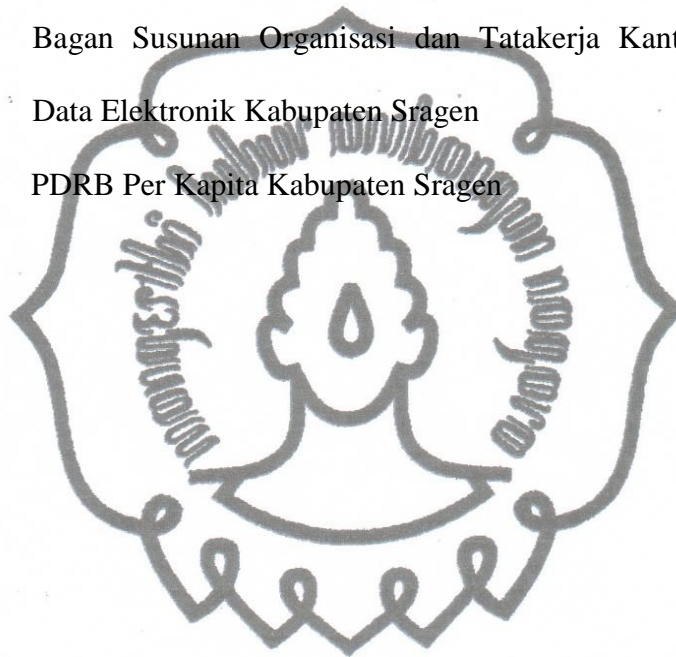
b. Fungsi	75
c. Kondisi Kepegawaian	75
d. Produk-produk Yang Telah Dihasilkan	77
C. Analisis Deskriptif	80
1. Investasi e-Government	80
2. Investasi Usaha	80
3. PDRB	81
4. Pelayanan Kependudukan	82
D. Analisis	
1. Uji Asumsi Klasik	84
a. Hasil Uji Normalitas	84
b. Hasil Uji Multikolinieritas	86
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
d. Hasil Uji Autokorelasi	88
2. Hasil Estimasi Model Analisis	88
a. Persamaan Regresi	89
b. Uji "t"	90
c. Koefisien Determinasi	91
d. Keputusan Uji	92
E. Pembahasan.	92
1. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan	92
2. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap Jumlah Investasi Swasta	93
3. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap PDRB	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Alokasi Anggaran Teknologi Informasi	11
4.1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	68
4.2	Jumlah penduduk berdasarkan Usia	68
4.3	Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan tiap kecamatan	69
4.4	Banyaknya Penduduk Umur 10 Tahun keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2009	70
4.5	Ketenagakerjaan tahun 2002 – 2009	71
4.6	Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen Menurut Tingkat Pendidikan	76
4.7	Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen Menurut Tingkat Jabatan	76
4.8	Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen Menurut Pangkat dan Golongan	77
4.9	Investasi <i>e-governmant</i> di Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010	80
4.10	Investasi Usaha di Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010	81
4.11	Pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010	83
4.12	Hasil Uji Normal Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov	85
4.13	Nilai VIF dan Tolerance Dari Uji Multikolinieritas	87
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas	88
4.15	Hasil Uji Autokorelasi	88
4.16	Hasil Analisis Regresi Linear dengan Variabel Bebas Investasi <i>e-governmant</i>	89

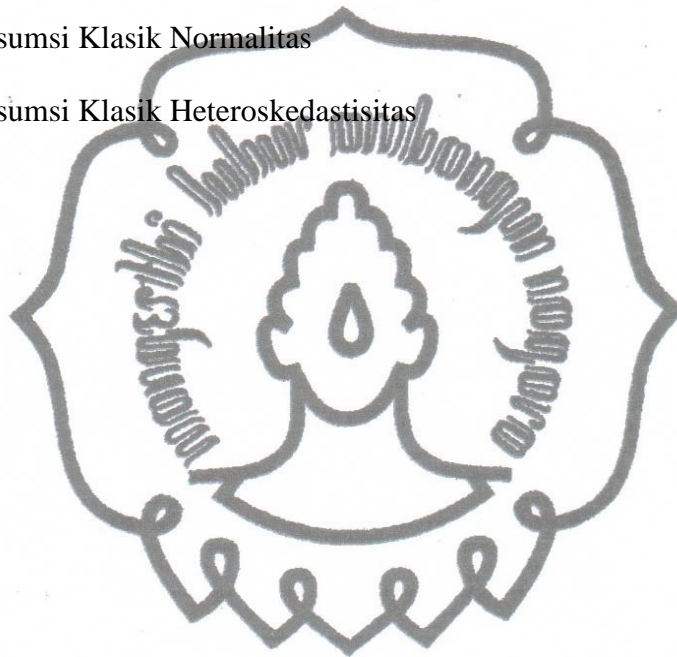
DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	58
	2 .1 Gambar Uji Durbin-Watson	65
	4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sragen	66
	4.2 Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen	74
	4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Sragen	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Data Hasil penelitian	99
2	Hasil Uji Hipotesis	100
3	Uji Asumsi Klasik Autokorelasi dan Multikolinearitas	106
4	Uji Asumsi Klasik Normalitas	108
5	Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas	109



ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT POPULATION OF SERVICE AND ECONOMY IN THE SRAGEN REGENCY

***Danu Hariadi
NIM : S 4209123***

Advances in technology are so rapid and its potential to be exploited, supported the need for better service bureaucracy, accountable, quick and satisfying to encourage governments to use in assisting the process of the provision of IT countries. Issuance of Presidential Instruction No. 3 of 2003 is a milestone early use of IT in the national scale. Sragen governments follow up by making the Strategic Development Plan for Information Technology Systems Sragen Regency Year 2006-2010 as a framework for regional development.

In the implementation that can be said to succeed, maketh evident from Sragen as pilot districts in the development of e-Government. Implementation of e-Government certainly can not be done without careful planning and adequate resources.

Result of this research came to the conclusion with the results of any effect the implementation of e-Gov investments of GDP in Sragen, there is the influence of the implementation of e-Gov investments affect the service population in Sragen regency, and there is the influence of the implementation of e-Gov investments affect the amount of investment in Sragen .

Rapid technological advances need to be considered specifically by the Sragen Regency. Rejuvenation of infrastructure in accordance with the changing times is absolutely necessary to maintain continuity of information and communication. Not only the infrastructure, human resource capability in accordance with technological progress also needs to have. So that periodic training should continue to be made if there is a new emerging technology, so that services can be improved again population. Implementation of e-Government in Sragen, it would be optimal if the charge on a single work units that are only focused on the development of eGovernment is Electronic Data Management Office still has the burden of work outside of the development of e-government.

Keyword: e-Gov investments, GDP, service population, Investor

ABSTRAKSI

ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SRAGEN

Danu Hariadi
NIM : S 4209123

Kemajuan teknologi informasi dengan melihat segala potensinya untuk memanfaatkan lebih jauh, tuntutan akan agar pelayanan birokrasi yang lebih baik, akuntabel, cepat dan memuaskan mendorong pemerintah untuk digunakan dalam membantu proses penyediaan Teknologi Informasi. Dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 merupakan tonggak awal penggunaan Teknologi Informasi dalam skala nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen menindaklanjutinya dengan membuat Rencana Strategis Pembangunan Teknologi Informasi pada Tahun 2006-2010, hal tersebut merupakan salah satu kerangka untuk pembangunan daerah.

Penerapan tersebut dapat dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sragen dijadikan sebagai kabupaten percontohan dalam pengembangan e-Government. Implementasi e-Government tentu tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai.

Hasil penelitian ini sebagai kesimpulan dengan hasil pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sragen, ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap populasi layanan di Kabupaten Sragen, dan ada pengaruh implementasi e-Gov investasi terhadap jumlah investasi di Sragen.

Kemajuan teknologi yang cepat perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Kabupaten Sragen. Pembaruan infrastruktur sesuai dengan perubahan zaman mutlak diperlukan untuk menjaga kontinuitas informasi dan komunikasi. Tidak hanya infrastruktur, sumber daya kemampuan manusia sesuai dengan kemajuan teknologi juga perlu memiliki. Sehingga pelatihan berkala harus terus dilakukan jika ada teknologi baru baru, sehingga layanan dapat ditingkatkan lagi populasi. Implementasi e-Government di Sragen, itu akan optimal jika muatan pada unit kerja tunggal yang hanya terfokus pada pengembangan eGovernment adalah Electronic Data Management Office masih memiliki beban kerja luar pengembangan e-government.

Kata Kunci: e-Gov investasi, PDB, populasi layanan, Investor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dengan melihat segala potensinya menginspirasi pemerintah untuk memanfaatkan lebih jauh. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain kemajuan Teknologi Informasi, ada sebab pendorong lain dari dikeluarkannya Inpres No 3 Tahun 2003 yaitu kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Reformasi yang terjadi 10 tahun terakhir menuntut transparansi, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena selama Orde Baru proses penyelenggaraan pemerintah terkesan tertutup, boros, tidak tepat sasaran, serta terkesan mengada-ada hingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat ini masih banyak yang perlu di perbaiki dalam perjalanan bangsa ini terutama dalam hal reformasi birokrasi. Ketika Indonesia bisa mengaplikasikan apa yang disebut dengan *good governance*, maka perlahan tapi pasti Indonesia akan keluar dari keterpurukan ini.

commit to user

Isu mengenai penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menjadi isu kebijakan yang aktual di masyarakat seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang baru (hasil revisi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999) dalam pasal 16 (ayat 1a), disebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal. Ketentuan ini memberikan suatu gambaran bahwa tuntutan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional telah menjadi bagian dari *concern* pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia dieirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis.

Ruang lingkup pelayanan dan jasa publik yang luas cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Luas cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi.

Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasi tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (*public services*) tersebut meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter yang dididik di universitas negeri, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di universitas negeri, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal dan memerlukan surat pengantar dan surat kematian untuk mendapatkan kapling di tempat pemakaman umum (TPU). Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup, apalagi yang berkaitan dengan pengadaan produk-produk pelayanan publik yang bersifat kewajiban seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, dan lain-lain.

Pengelolaan sumber daya yang ada bisa dilakukan secara *good governance* serta maksimal maka hal ini bisa digunakan sebagai bekal untuk membawa negeri ini keluar dari keterpurukan. *Good governance* sendiri baru

commit to user

akan terbentuk jika memenuhi delapan aspek prinsip-prinsip *good governance* yang dikeluarkan oleh Depdagri sebagaimana tertera dibawah ini:

1. Aspek *Partisipasi Masyarakat* yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aspek *Tegaknya Supremasi Hukum*, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Aspek *Transparansi* yaitu transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Aspek *Berorientasi pada Konsensus* yaitu Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
5. Aspek *Peduli pada Stakeholder* yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

6. Aspek *Kesetaraan* yaitu semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Aspek *Efektifitas* dan *Efisiensi* yaitu proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Aspek *Akuntabilitas* yaitu para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Good governance sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi, penegakkan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan *mind-set* dan *culture-set*, perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar menjadi lebih produktif, efisien dan efektif.

Sasaran dari reformasi birokrasi salah satunya adalah pegawai itu sendiri karena jika perilaku dari para pegawai tersebut tidak ada perubahan maka reformasi birokrasi akan berjalan ditempat. Kementerian PAN telah menganalisis reformasi birokrasi pemerintahan dan telah mengidentifikasi Pokok-pokok Pikiran Tentang Reformasi Birokrasi Aparatur Negara (kajian Kedeputan Menpan Bidang Program tahun 2003-2004) yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kajian Kelembagaan.

Organisasi ramping struktur dan kaya fungsi, efisien, dan efektif, organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, rasional, dan proporsional, datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas, *span of control* yang ideal, bersifat jejaring, banyak diisi jabatan-jabatan fungsional (mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya), dan menerapkan strategi organisasi pembelajaran yang cepat beradaptasi dengan terhadap perubahan.

2. Kajian Sumber Daya Manusia Aparatur

SDM yang ingin dibangun adalah PNS yang profesional, netral, dan sejahtera, berdayaguna, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat, jumlah dan komposisi pegawai yang ideal, fungsi dan beban kerja yang ada di masing-masing instansi pemerintah.

3. Kajian Tata Laksana atau Manajemen

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah diharapkan ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif, melalui pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana.

4. Kajian Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Pemahaman tentang akuntabilitas terus ditingkatkan dan diupayakan agar diciptakan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas tinggi, akuntabel dan bebas KKN, ditandai oleh sistem akuntabilitas kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif.

5. Kajian Pengawasan

Diharapkan terbangun sistem pengawasan nasional dengan elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal.

6. Kajian Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel

7. Kajian Budaya Kerja Produktif, Efisien, Dan Efektif

Penumbuhkembangan budaya kerja produktif, efisien dan efektif harus didorong agar terbangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif, terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi melalui: pengembangan budaya kerja yang mengubah mind-set, sikap dan perilaku serta motivasi kerja; membangun birokrat berjiwa entrepreneur, dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi.

8. Kajian Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi

Perlu ditingkatkan koordinasi program dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pendayagunaan aparatur negara.

Indikasi dari buruknya kinerja birokrasi adalah masih banyaknya prasangka-prasangka akan adanya kebocoran dalam pengelolaan lembaga departemen sehingga menjadikan pengelolaan pemerintahan yang kurang efisien, sebaliknya malah merugikan negara. Beberapa waktu lalu juga

diberitakan di media tentang inspeksi mendadak oleh KPK di Dirjen Bea dan Cukai dengan hasil ditemukan uang 500 juta rupiah yang di indikasikan hasil tindak korupsi (Kompas.com). Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan birokrasi masih perlu banyak berbenah.

Berbagai masalah tersebut timbul karena kurang adanya keefektifan, efisiensi, dan transparansi yang belum tersentuh dalam pengelolaan birokrasi dan dengan kemajuan teknologi informasi yang ada keefektifan bisa diperoleh, efisiensi maksimal dan mekanisme-mekanisme berbelit yang ada bisa dipermudah. Sebagai contoh adalah ketika akan adanya pertemuan mendadak antara bupati dengan kepala desa. Jika belum ada teknologi informasi ini maka setiap kepala desa harus dikirim surat terlebih dahulu. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan surat dan mengantar surat tersebut ke berbagai pelosok desa? Bandingkan jika dengan menggunakan surat elektronik atau sering dikenal dengan *email*. Hanya dengan beberapa kali 'klik' maka *email* tersebut bisa sampai pada kepala desa hanya dalam hitungan detik.

Penggunaan teknologi informasi beserta aplikasi yang menyertainya dalam pengelolaan birokrasi dikenal dengan *electronic government* atau biasa dikenal dengan *e-Government*.

Implementasi Teknologi Informasi (TI) akan semakin penting peranannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam dunia pemerintahan, TI kita kenal dengan sebutan *e-Government (e-Gov)* yang secara prinsip bertujuan memperbaiki kualitas layanan public, meningkatkan *efisiensi* dan *transparansi*. Sehingga *e-Gov* *commit to user*

merupakan sesuatu yang perlu untuk dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan. Implementasikan *e-Gov* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, dimana tujuan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap elemen masyarakat.

e-Gov dapat digunakan untuk mendukung administrasi organisasi agar lebih rapi dan hemat biaya. Fasilitas database, dukungan grafis, alat pendukung simulasi dan modeling adalah dukungan integral bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, manajemen dan pembangunan.

Pemanfaatan *e-Gov* di pemerintahan bisa di bagi dalam empat kategori, yaitu sistem informasi di dalam lembaga pemerintahan, sistem informasi antar lembaga pemerintah untuk memudahkan koordinasi, sistem informasi antara pemerintah dan kalangan bisnis, dan sistem informasi untuk warga masyarakat umum guna meningkatkan layanan masyarakat. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Penggunaan *e-Gov* ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pada contoh diatas *e-Government* bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk layanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Citizens (G2C)*.

Layanan Pembuatan KTP tentang biaya dan lamanya proses pembuatan adalah contoh layanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat t pada hubungan layanan pemerintah yang bersifat *Government to Citizens*
commit to user

(G2C). Dulu jika belum ada reformasi maka membuat KTP saja biaya yang dikeluarkan sedikit tidak rasional dengan memakan waktu beberapa hari. Namun dengan adanya e-Government ini membuat KTP biaya yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan dengan jangka waktu hanya beberapa menit saja.

Dikembangkannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau biasa dikenal dengan *e-procurement* disingkat dengan *e-Proc* adalah contoh layanan yang bersifat *Government to Business (G2B)*. Pengadaan barang jasa merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi di mekanisme ini sering kita jumpai di media belakangan ini. *e-Proc* mengalihkan proses pengadaan barang dan jasa yang mula-mula dilaksanakan secara manual kemudian dilaksanakan dengan mekanisme elektronik.

Kemudahan dan kelebihan dalam penggunaan teknologi informasi diatas telah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen setelah melakukan pengembangan teknologi informasi dalam mekanisme birokrasi diwilayah kerjanya. Investasi ke arah terselenggaranya pengembangan Teknologi Informasi telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD sejak tahun 2002 – sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Alokasi Anggaran Teknologi Informasi
Di Kabupaten Sragen Tahun 2002-2009

Tahun	Besar Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Jumlah SDM IT	Investasi Masyarakat	Jumlah Pemohon / Masyarakat	PDRB (%)
2002	750.000.000	APBD	4 Orang	592 M	2027	3.42
2003	1.400.000.000	APBD	6 Orang	703 M	3170	3.63
2004	1.750.000.000	APBD	12 Orang	926 M	3332	4.93
2005	1.750.000.000	APBD	18 Orang	955 M	4072	5.16
2006	2.250.000.000	APBD	27 Orang	1,2 T	5274	5.18
2007	6.500.000.000	APBD	32 Orang	1,3 T	4548	5.73
2008	2.750.000.000	APBD	32 Orang	1,2 T	5034	5.69
2009	2.000.000.000	APBD	32 Orang	1,35 T	4873	6.01

Sumber : Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE), Bappeda, DisDukCapil dan BPT Kab Sragen

Impres No 3 Tahun 2003 mengisyaratkan Pemerintah Kabupaten Sragen agar lebih fokus dalam pengembangan *e-Government*, maka tanggung jawab pengelolaan ini diberikan kepada Bagian Litbang dan Data Elektronik Sekretariat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dan pada Tahun 2009 berdasarkan SOTK yang mengacu pada PP No. 41 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati No 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, Bagian Litbang dan PDE berubah status menjadi Kantor Pengelola Data Elektronik. Tata kelola KPDE sendiri di kuatkan tersendiri oleh Peratutan Bupati No 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab. Sragen.

Rencana Strategis Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Kabupaten Sragen Tahun 2006-2010 menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari penerapan *e-Government* ini antara lain :

1. Mewujudkan kemadirian, kemajuan dan menegakkan supremasi hukum dengan jalan memperkuat ekonomi berbasis IPTEK
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dengan jalan meningkatkan penguasaan IPTEK
3. Mengembangkan IPTEK sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dengan jalan memperluas jaringan pelayanan terpadu yang cepat, akurat dan terpercaya bagi semua sektor kehidupan.

Berbagai kemudahan akibat penerapan *e-Government* telah benar-benar dirasakan oleh warga Sragen. Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen yang dirintis sejak tahun 2002, mengurus izin harus melalui beberapa instansi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurusnya cukup panjang. *Software online* sudah ada sampai kecamatan, serta sentral data yang terdapat pada Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Catatan Sipil maka akan menjadikan *double control* sekaligus. Proses pelayanannya juga sangat cepat. Selain itu jika terjadi permasalahan semuanya bisa diketahui secara cepat dan pihak aparatur pemerintah pun akan bertindak secepat mungkin untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan Pemkab Sragen mengimplementasikan *e-Government* di wilayah kerjanya.

commit to user

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah investasi implementasi *e-Governmant* berpengaruh positif terhadap Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Sragen?
2. Apakah investasi implementasi *e-Governmant* berpengaruh positif terhadap Jumlah Investasi Swasta di Kabupaten Sragen?
3. Apakah investasi implementasi *e-Governmant* berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh investasi implementasi *e-Governmant* terhadap Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Sragen.
2. Pengaruh investasi implementasi *e-Governmant* terhadap Jumlah Investasi Swasta di Kabupaten Sragen.
3. Pengaruh investasi implementasi *e-Governmant* terhadap PDRB di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian studi dengan membandingkan antara kenyataan yang bersifat empiris di lapangan dengan pengetahuan yang bersifat teoritis, terutama yang berhubungan dengan pelayanan umum.
- c. Menambah wawasan penulis dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Sragen.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dasar bagi pengembangan *e-Government* Kabupaten Sragen yang dikelola oleh Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen.
- b. Hasil Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi daerah lain yang ingin menerapkan *e-Government*.
- c. Meningkatkan pemahaman pejabat publik dan masyarakat akan arti pentingnya *e-Government*.
- d. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang dunia teknologi informasi terutama berkenaan dengan *e-Government*.

commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Pelayanan publik (*public services*) oleh Pemerintah tersebut adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

commit to user

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya sehingga birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mendefinisikan Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

commit to user

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah :

- 1) Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
- 2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

- 1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
- 2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
- 3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan keluhan publik Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan keputusan untuk mengatur sistem dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

KEPMENPAN tersebut berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan keluhan publik untuk semua jenis pelayanan publik baik pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah sebagai berikut: kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich *dalam* Solichin, 2005:3).

commit to user

R Dye *dalam* Islamy (1994:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever governments choose to do or no to do* ” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Kebijakan Publik menurut Easton *dalam* Thoha (2003:62) merumuskan sebagai berikut : “*the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values*”. (alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut)

Anderson *dalam* Nurcholis (2005:159) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, lima hal yang berhubungan dengan kebijakan public, tersebut: Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif. Kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari beberapa pemaparan di atas adalah bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah yang menyangkut kepentingan dari rakyatnya dengan arah dan tujuan tertentu.

b. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah diperoleh dari kebijakan yang diterapkan. Tujuan evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari penerapan kebijakan dilihat dari harapan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan menurut Anderson *dalam* Winarno (2002:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan berarti tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Pendapat Dunn *dalam* Riant (2003:185), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*asessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberikan sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk rumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Fungsi evaluasi kebijakan menurut Dunn dan Repley *dalam* Wibawa (1994:10-11) yaitu:

- 1) Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

- 2) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.

commit to user

3) Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi, desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.

4) Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan kegiatan evaluasi ini diharapkan akan diketahui sejauh mana keberhasilan dari sebuah kebijakan. Apabila kebijakan tersebut gagal maka dapat diketahui penyebab kegagalannya sehingga tidak terulang dimasa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat empat aspek yaitu proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas kebijakan (Wibawa,1994:9).

Evaluasi penelitian ini difokuskan untuk mengetahui proses implementasi, mengingat berhasil atau gagalnya suatu kebijakan mencapai tujuan atau target tertentu sangat bergantung pada proses implementasinya.

c. Implementasi Kebijakan

Definisi implementasi menurut Westra et al., (2002:65) adalah sebagai berikut : *“Those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. (“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”).

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi dirumuskan sebagai berikut : Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan (Samodra, 1994:15).

Implementasi memiliki banyak definisi, diantaranya definisi implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab :2005:65) yaitu : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi berarti suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta (individu/kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Kesimpulan definisi evaluasi kebijakan dan definisi implementasi kebijakan adalah definisi evaluasi implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan dengan fokus pada proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta (individu/kelompok).

3. *Electronic Government (e-Gov)*

Salah satu definisi *e-Government* berdasarkan kamus komputer dan teknologi informasi yaitu kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. *e-Government* sering juga disingkat dengan *e-Gov*.

Berbicara tentang *e-Government*, bukan sekedar hanya menambah huruf “e” di depan kata *government*. *e-Government* tidak sama dengan komputerisasi, tidak identik dengan pembelian *software* yang banyak, juga tidak dapat diukur dengan banyaknya jumlah dana yang dianggarkan untuk infrastruktur dan implementasinya. Hal itu timbul akibat tidak adanya

commit to user

suatu konsep yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *e-Government*.

Word Bank memberikan pengertian *electronic government* yang lain sebagai berikut, “*government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency*” (Sistem teknologi komunikasi dan informasi milik pemerintah ataupun yang diusahakan yang mentransformasikan hubungan dengan rakyat, sektor swasta dan atau badan pemerintah yang lain, dengan tujuan untuk menyuarakan penguatan masyarakat, meningkatkan pelayanan jasa, menguatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi ataupun efisiensi pemerintahan”)

Direktur dari *Institute for Electronic Government (IBM Corporation)* Caldow, dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Havard University, memberikan sebuah definsi yang menarik, yaitu: “*electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we not witnessed since the beginning of the industrial era*” (Elektronik goverment tidak semata sebuah transformasi pemerintahan dan tata pemerintahan yang mendasar dalam kapasitas yang mana kita tidak menyaksikannya sejak zaman industry). (Indrajit,2002:3)

commit to user

Pengertian lain disampaikan oleh West dari Brown University : *e-Government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means (e-Government dapat diartikan mengantarkan pelayanan dan informasi pemerintah melalui internet atau peralatan digital lainnya) (Public Administration Review; January/February; 2004; Vol 64; No 1)*

Marche dan McNiventh dari Dalhousie University memberikan definisi : *e-Government is the provision of routine government information and transaction using electronic means, most notaby those using internet technologies, whether deliver at home, at work, or through public kiosks (e-Government adalah tindakan rutin berupa informasi dan transaksi pemerintah menggunakan peralatan elektronik, kebanyakan teknologi internet yang diantarkan ke rumah, tempat kerja, atau kios umum) (Canadian Journal of Administrative Science; March; 2003; Vol 20; No 1)*

Terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government* berdasarkan pengertian-pengertian diatas, masing-masing adalah :

- 1) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*);
- 2) Melibatkan penggunaan teknologi informasi ;
- 3) Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang ada selama ini.

Jika ketiga karakteristik diatas digabung maka *e-Government* mempunyai definisi seperti ini: penggunaan teknologi informasi sebagai mekanisme interaksi antara pemeritan dengan rakyatnya, atau dengan *stakeholder* yang ada dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan yang ada selama ini.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government disebutkan tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan diimplementasikannya *e-Government* di indonesia, diantaranya adalah :

- 1) Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
- 2) Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*.

Kesemua permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan pengembangan (*guidelines*) yang bersifat komprehensif dan mencakup integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh
commit to user

pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan instansi yang bersangkutan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu untuk menjadi motivator, inisiator dan koordinator dalam rangka pengembangan konsep Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Konsep tersebut akan menjadi acuan pengembangan utama yang mendasari setiap rancang bangun sistem informasi yang ada pada instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki fungsi sebagai pintu gerbang informasi nasional dalam rangka tugas utamanya sebagai Country Information Office (CIO), untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan sebagai CIO pemerintah, integrasi sistem informasi yang bersifat nasional menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Perancangan Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) merupakan upaya Pemerintah dalam rangka membangun suatu sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota hingga tingkat Pemerintah Pusat, sebagai pelaksanaan UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

commit to user

Daerah Otonom, pada Bab II Pasal 2 ayat 4 butir n, tentang kewenangan pemerintah dalam penetapan kebijakan sistem informasi nasional.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government juga mengatur tentang aspek aspek pemanfaatan teknologi informasi, antara lain :

- 1) *E-Leadership*; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
- 2) Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.
- 3) Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
- 4) Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
- 5) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik

perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Setelah definisi *e-Government* dan pentingnya pengembangan dari *e-Government* diketahui ada beberapa tahapan penerapan *e-Government* di lembaga pemerintah mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/Kep/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga.

Pentahapan tersebut antara lain :

a. Tingkat Persiapan, antara lain:

- 1) Pembuatan situs web pemerintah
- 2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*
- 3) Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose Community Center (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain
- 4) Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal
- 5) Pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* (*awareness building*)
- 6) Penyiapan peraturan pendukung.

b. Tingkat Pematangan, antara lain:

- 1) pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain
- 2) pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

c. Tingkat Pemantapan, antara lain:

- 1) Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain
- 2) Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

d. Tingkat Pemanfaatan, antara lain :

- 1) Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Community*) yang terintegrasi
- 2) Pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien
- 3) Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

Indrajit (2002:29) mengungkapkan dalam pentahapan *e-Government*, antara lain :

a. Tahap pertama adalah *Publish*,

commit to user

Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Salah satu contoh aplikasi *e-Government* di dalam kelas ini adalah : masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

b. Tahap kedua adalah *Interact*,

Pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Contoh aplikasi ini adalah dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

c. Tahap ketiga adalah *Transact*,

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasi ini adalah :

commit to user

masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui aplikasi *online*.

Bambang N Prastowo, dari Pusat Pelayanan Teknologi dan Informasi UGM menyatakan dalam makalahnya *Management e-Gov*, Elemen-elemen *e-Government* (2004) ada beberapa elemen dalam penyelenggaraan *e-Government*. Elemen tersebut antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi *e-Government* dapat dan sudah selayaknya merubah pola kerja aparat pemerintahan. Sebagai contoh, dengan komputerisasi sistem anggaran dan akuntansi pemerintahan, tidak ada lagi pekerjaan pengumpulan data untuk membuat laporan kemajuan penyerapan anggaran. Segala bentuk laporan, bila diperlukan, telah disediakan oleh sistem dengan ketelitian yang hanya bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Elemen ini masih terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

1) Masyarakat Umum

Fasilitas akses ke sistem *e-Government* bagi masyarakat luas dapat diberikan dalam bentuk terminal-terminal secara khusus yang dipasang publik maupun memasang sistem informasi berbasis *website* agar bisa diakses melalui Internet. Agar keberadaan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan peningkatan kualitas masyarakat dalam bidang pengoperasian *e-Government* itu sendiri.

commit to user

2) Aparat Pemerintah

Sistem *e-Government* haruslah bersifat dinamis dalam arti setiap saat dapat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan pemerintahan itu sendiri.

3) Pimpinan

Sistem komunikasi yang terpasang akan berkembang kearah yang optimal bagi suatu instansi apabila semua pihak, dimulai dari pimpinan, punya komitmen tinggi untuk memanfaatkannya.

4) Operator

Kunci keberhasilan *e-Government* terletak pada ketelitian kerja operator. Keteledoran operator memasukkan data secara langsung akan mengurangi nilai kebenaran laporan yang dihasilkan.

5) KPDE (Kantor Pengelola Data Elektronik)

Agar dapat mengikuti perubahan dengan cepat, pada implementasi *e-Government* harus ada badan yang memahami sepenuhnya cara kerja sistem sampai ke rincian komponen-komponennya.

b. Perangkat Lunak

Elemen perangkat lunak terbagi menjadi :

1) Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berhubungan dengan manajemen perangkat keras yang digunakan. Keseragaman sistem operasi memberikan banyak kemudahan antara lain kesederhanaan proses pelatihan serta pemeliharaan sistem.

commit to user

2) Perangkat Lunak Serbaguna

Pada dasarnya, perangkat lunak serbaguna banyak dimanfaatkan untuk menggantikan mesin ketik dan mesin hitung untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan sehari-hari.

3) Kastemisasi

Kastemisasi adalah kegiatan memodifikasi perangkat lunak serbaguna untuk kegiatan komputasi khusus. Kastemisasi dapat dilakukan dengan merancang suatu dokumen standar yang dapat dimanfaatkan berkali-kali hanya dengan mengganti bagian-bagian tertentu saja.

4) Perangkat Lunak Aplikasi Khusus

Aplikasi khusus diperlukan untuk membantu pekerjaan khusus seperti pendataan yang menyangkut pemetaan wilayah, desain grafis untuk penerbitan brosur-brosur dan sebagainya.

5) Pengembangan Khusus

Pengembangan perangkat lunak khusus diperlukan untuk melayani kebutuhan spesifik pemerintahan secara keseluruhan.

6) Pengembangan Dadakan

Dalam perkembangan implementasi *e-Government*, sering ditemui kebutuhan untuk pengembangan sistem dadakan semisal ada permintaan laporan dalam format yang belum pernah dimintakan sebelumnya.

c. Perangkat Keras

Pembagian elemen perangkat keras adalah sebagai berikut :

1) *Input dan Output*

Perlatan pemasukan dan penyajian data standar adalah terminal kerja yang terdiri dari *keyboard* dan monitor yang dilengkapi dengan pemandu posisi penunjukan di layar yang dikenal dengan istilah *mouse*. Untuk keperluan khusus misalnya mengagendakan surat masuk diperlukan scanner yang memisahkan tampilan kertas surat ke bentuk digital yang bisa dibaca dengan layar monitor. Untuk membaca informasi sehari-hari, cukup digunakan monitor. Namun demikian sering informasi tersebut harus diserahkan ke pihak lain yang tidak punya akses ke sistem. Pada umumnya, informasi dicetak ke kertas untuk dikirim.

2) Jaringan

Dengan fasilitas ini banyak hal bisa dilakukan. Dalam kaitannya dengan *e-Government*, jaringan komputer mutlak diperlukan bagi operator dan masyarakat luas untuk membaca informasi yang benar dan terbaru.

3) *Server*

Yang dimaksud dengan *server* adalah komputer yang digunakan untuk memberikan layanan tertentu pada para pengguna komputer yang terhubung ke *server* tersebut. Layanan bisa diberikan secara langsung seperti pada *server Web* (melayani akses homepage
commit to user)

melalui *web browser*) atau server printer yang memberi layanan perintah pencetakan naskah yang dikirim dari komputer lain.

d. Sistem Informasi Terintegrasi

Ada 2 dimensi penyumbang kompleksitas *e-Government*: dimensi fungsional dan dimensi wilayah. Fungsi yang sama bisa mendapat perlakuan berbeda di wilayah yang sama. Sebagai contoh, tidak semua wilayah memiliki fasilitas teknologi komunikasi dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu yang perlu dijaga adalah konsistensi data.

Di banyak pemerintahan, masing-masing instansi bisa memberikan informasi tertentu, misalnya data jumlah penduduk yang berbeda satu sama lain. Perbedaan bisa disebabkan karena datanya yang memang berbeda (tidak *ter-update* secara berbarengan) atau sering karena ada perbedaan definisi. BPS cenderung akan memberikan data jumlah penduduk dalam pengertian jumlah orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cenderung memberikan data berdasarkan pemegang KTP.

e. Standart Prosedur Pengoperasian

Sering sistem tidak berfungsi secara optimal karena standar prosedur pengoperasiannya tidak tersosialisasikan dengan baik ke masing-masing pengguna. Beberapa elemen pendukung dari point ini antara lain :

commit to user

1) Masyarakat

Selain aparat pemerintah, standar prosedur pengoperasian sistem *e-Government* harus difahami pula oleh masyarakat. Sebagai contoh, otomasi pengambilan perijinan, memasukkan data persyaratan harus mengikuti prosedur yang baku agar sistem bisa memrosesnya.

2) Aparat Pemerintah

Pada prinsipnya dikehendaki sistem yang meminimalkan kontak orang-perorang antara pengguna jasa, dalam hal ini masyarakat luas dan penyedia jasa yang diwakili oleh aparat pemerintah. Agar sistem dapat berjalan lancar, setiap pengguna harus memahami standar prosedur pengoperasiannya

f. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual bidang perangkat lunak komputer menjadi permasalahan umum. Kekurang pemaahaman ini menimbulkan persepsi bahwa dana yang tersedia lebih berharga digunakan untuk pengadaan perangkat keras dibanding perangkat lunak.

Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan *e-Government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan manfaat seperti :

commit to user

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya.
- 2) Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan
- 3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
- 4) Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

4. Teknologi Informasi

Wikipedia Indonesia menjelaskan bahwa Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.(Wikipedia.com)

Teguh Arifiyadi, SH dari Inspektorat Jenderal Depkominfo memberikan opini teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi (depkominfo.go.id).

Teknologi Informasi berdasarkan pada beberapa pengertian di atas adalah hal yang bisa dijabarkan lebih lanjut, diantaranya adalah menurut Supriyanto (2005:245) bahwa suatu informasi dapat dikatakan memiliki *commit to user*

manfaat dalam proses pengambilan keputusan apabila informasi tersebut mempunyai kualitas. Kriteria kualitas informasi adalah :

1) Akurat

Yang berarti informasi harus tidak bias atau menyesatkan dan bebas dari kesalahan.

2) Tepat waktu

Yang berarti informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Mahalnya nilai informasi saat ini karena harus cepatnya informasi tersebut didapatkan, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimnya.

3) Relevan

Yang berarti informasi harus mempunyai manfaat bagi pihak yang menerimanya

Teknologi informasi sendiri tidak bisa dilepaskan dari komputer sebagai piranti untuk memproses data. Jika kemudian untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik maka piranti yang digunakan pun juga harus maksimal. Sebagai pengolah informasi, komputer memiliki beberapa karakteristik sehingga tepat untuk digunakan. Karakteristik tersebut antara lain :

1) Kecepatan

Dalam distribusi informasi dan pengolahan data, faktor kecepatan sangat dibutuhkan oleh manajemen. Ini untuk memberikan atau menyajikan informasi yang berkelanjutan.

commit to user

2) Kapasitas

Volume data yang besar bisa diolah dengan cepat dan tepat.

3) Repetitif

Dalam pengolahan data yang memiliki prosedur sama, pengolahan dengan komputer akan memakan waktu yang singkat.

4) Input yang pasti

Komputer membutuhkan input yang pasti, karenanya intuisi dan pertimbangan bukanlah merupakan atribut mesin.

5) Output yang akurat

Hasil yang sangat akurat bisa diperoleh dan hal ini tidak terpengaruh oleh faktor psikologis seperti kebosanan atau kelelahan. (Supriyanto 2005:249)

Teknologi Informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan *e-Government* dalam rangka mewujudkan sebuah *good governance*.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah atau kabupaten, dengan cara mengurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto dari tiap-sektor dalam jangka waktu tertentu (Sadono, 2005).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

a. Menurut pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masingmasing total produksi bruto tiap kegiatan

subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan, 2005).

b. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima factor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Tarigan, 2005:24).

c. Menurut pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga,

konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi.

6. Kualitas Pelayanan

a. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep. MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis.

Pada bagian lain Gaspersz (1997) dalam mengutip Juran memberikan definisi manajemen kualitas sebagai suatu kumpulan aktivitas yang berkualitas dengan kualitas tertentu yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen.
- 2) Sasaran kualitas dimasukkan ke dalam rencana bisnis.
- 3) Jangkauan sasaran diturunkan dari *benchmarking* : fokus adalah pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi; di sana adalah sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan.

commit to user

- 4) Sasaran disebarkan ke tingkat mengambil tindakan.
- 5) Pelatihan ditetapkan pada setiap tingkat
- 6) Pengukuran ditetapkan seluruhnya
- 7) Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan sasaran
- 8) Penghargaan diberikan untuk kinerja terbaik
- 9) Sistem imbalan (*reward system*) diperbaiki

Parasuraman *et al.*, (1985) menyatakan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu *expective service* (pelayanan yang diharapkan) dan *perceived service* (pelayanan yang diterima). Karena kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan, untuk itu maka, Zeithaml dan Bitner, (1996) mendefinisikan bahwa pelayanan adalah penyampaian secara *excellent* atau superior dibandingkan dengan harapan konsumen.

Zeithaml dan Bitner, (1996) menyatakan bahwa konsumen dalam melakukan penilaian terhadap kualitas jasa ada lima dimensi yang perlu diperhatikan :

- 1) *Tangible*, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.

- 2) *Emphaty*, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
- 3) *Responsiveness*, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- 4) *Reliability*, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, kehandalan dan memuaskan.
- 5) *Assurance*, yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, resiko dan keraguraguan).

b. **Manajemen Kualitas Pelayanan**

Ketika pelanggan mempunyai suatu urusan/keperluan pada sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, ia akan merasa senang atau tidak senang saat dilayani oleh petugas. Jika pelanggan merasa senang dilayani oleh petugas tersebut, maka pelayanan petugas sangat memuaskan atau pelayanan petugas berkualitas. Sebaliknya, ketika pelanggan merasa dirugikan akibat pelayanannya berbelit-belit, tidak terbuka/transparan tentang apa yang diinginkan oleh aparat itu, maka dapat dikatakan pelayanannya tidak berkualitas.

Suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban ialah mengapa pelanggan tidak mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan? apakah semua persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi? Jika semua persyaratan telah dilengkapi tetapi pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa mungkin terdapat sesuatu yang belum terbaca/atau belum terdapat dalam suatu *Memorandum of Understanding* antara pelayan di suatu pihak dan pelanggan yang sedang dalam proses pelayanan di lain pihak. Untuk mendapatkan jawaban kepastian kualitas pelayanan, diperlukan kesepahaman tentang aturan main pelayanan yang diberikan, baik dari sisi aparatur pelayan maupun pelanggan.

Gaspersz (1997) menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu atau pribadi dalam bentuk tingkah laku seseorang yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kualitas pelayanan sektor publik adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan azas-azas pelayanan publik/pelanggan. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan sesuai standar baku sebagai pedoman dalam pemberian layanan.

commit to user

Parasuraman dalam Tjiptono (1996) telah berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor atau dimensi utama yang menentukan kualitas jasa. Kesepuluh jasa tersebut adalah:

- 1) *Reliability*, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (*performance*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependability*).

Dalam hal ini perusahaan pemberi jasanya secara tepat semenjak saat pertama (*right, the first time*) dalam memenuhi janjinya. Misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakatinya.

- 2) *Responsiveness*, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

- 3) *Competence*, artinya setiap karyawan dalam perusahaan jasa tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tersebut.

- 4) *Access*, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui.

Hal ini berarti lokasi, fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah untuk dihubungi.

- 5) *Courtesy*, yaitu meliputi sikap yang sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain).

- 6) *Communication*, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.
- 7) *Credibility*, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik, *contact personnel*, dan interaksi dengan pelanggan.
- 8) *Security*, yaitu aman dari bahaya, resiko, keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik, keamanan finansial serta kerahasiaan.
- 9) *Understanding knowing the customer*, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan.
- 10) *Tangible*, yaitu bukti fisik dari jasa yang bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, dan representasi fisik dari jasa.

7. Investasi

Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang (Dornbusch, Fisher dan Startz, 2004). Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok

barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, yang terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Pengeluaran investasi dapat juga meliputi pengeluaran yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini kegiatan investasi dapat dibedakan atas investasi yang otonom dan investasi yang terdorong (Harjanti, 2005).

Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya, misalnya investasi untuk pembuatan jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan infrastruktur lainnya. Sedangkan

investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian investasi otonom dan investasi yang terdorong adalah saling mendukung satu sama lain. Dengan investasi otonom diharapkan akan meningkatkan permintaan, yang pada gilirannya akan mendorong investasi.

Jenis investasi juga dapat dibedakan atas *public investment* dan *private investment*, *domestic investment* dan *foreign investment*, *gross investment* dan *net investment*. *Public investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sifatnya resmi. Sedangkan *private investment* adalah investasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah, bahwa dalam investasi swasta keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan *foreign investment* adalah penanaman modal asing. *Gross investment* adalah total seluruh investasi yang dilaksanakan pada suatu waktu, baik itu *autonomous* maupun *induced* atau *private* maupun *public*. Sedangkan *net investment* adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.

Para pelaku investasi adalah Pemerintah, Swasta, dan kerjasama Pemerintah – Swasta. Investasi Pemerintah umumnya dilakukan tidak

commit to user

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya swasta tidak tertarik pada investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama (Brata, 2005). Pihak swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba, yang biasanya terdorong oleh karena adanya penambahan pendapatan.

B. Kerangka Pemikiran

Kebutuhan terhadap sebuah pemerintahan yang bersih telah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang perlu didukung oleh semua pihak. Terlepas dari mana datangnya desakan untuk mengeluarkan kebijakan ini, dari luar pemerintah atau datang atas kesadaran pemerintah sendiri, kebijakan ini perlu untuk mendapatkan perhatian khusus.

Kerangka pikir ini dimulai dari dikeluarkannya Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kemudian di lanjutkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/Kep/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga.

Pemkab Sragen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen pengelolaan e-Government sendiri diberikan kepada Kantor Pengelola Data Elektronik.

Dalam implementasinya yang sudah bisa dikatakan berhasil, terbukti dari dijadikannya Kabupaten Sragen sebagai kabupaten percontohan dalam pengembangan *e-Government*. Implementasi *e-Government* tentu tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat beserta potensinya untuk dimanfaatkan, ditunjang adanya kebutuhan pelayanan birokrasi yang semakin baik, akuntabel, cepat dan memuaskan mendorong pemerintah untuk menggunakan TI (Teknologi Informasi) dalam membantu proses penyelenggaraan negara. Dikeluarkannya Inpres no 3 tahun 2003 merupakan tonggak awal penggunaan TI dalam skala nasional. Pemkab Sragen menindak lanjuti dengan membuat Rencana Strategis Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Kabupaten Sragen Tahun 2006-2010 sebagai kerangka pembangunan daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya, menemukan bahwa implementasi *e-government* mempunyai manfaat dan dampak yang cukup signifikan dalam banyak hal. Manfaat tersebut antara lain adalah peningkatan efisiensi, kualitas layanan publik, transparansi, partisipasi publik, dan pengembangan ekonomi (Seifert dan Bonham, 2003; Grönlund et al., 2005; Kumar dan Best, 2006). Implementasi *e-government* supaya efektif, harus mempertimbangkan konteks lokal. Kata kunci dalam implementasi *e-government* menurut Heeks (2003),

bukan adopsi, tetapi adaptasi di mana konteks lokal dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi.

Focus implementasi e-government dalam literatur ditemukan bahwa terdapat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pada transparansi dan perang terhadap korupsi (Grönlund et al., 2005). Meski demikian, peningkatan kualitas layanan, sangat erat kaitannya dengan kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*.

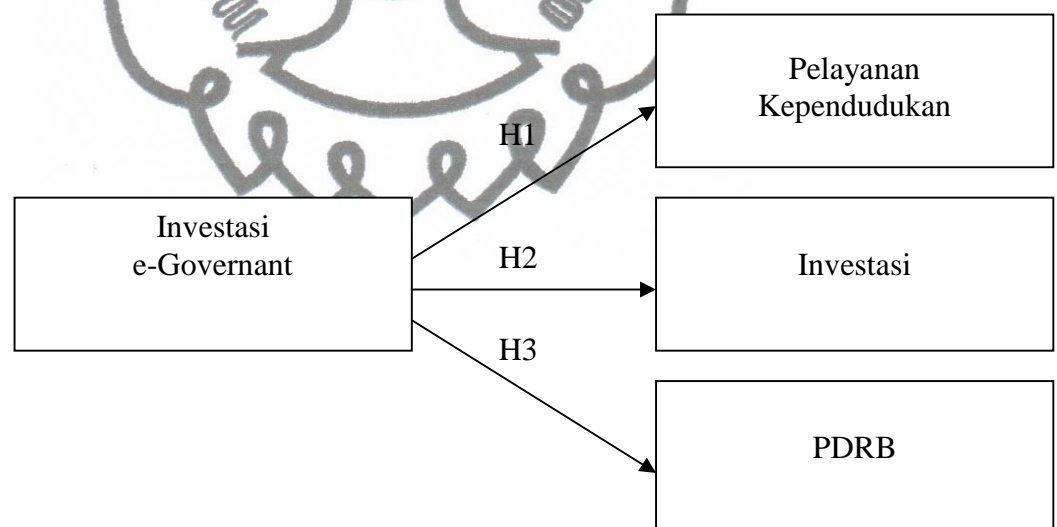
Good governance mulai populer menjadi wacana di Indonesia setelah tumbangnya orde baru. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (<http://www.worldbank.org>). *Good governance* merupakan perangkat untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (<http://www.menpan.go.id>).

Keberhasilan pelaksanaan *good governance* dapat dinilai dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pendukungnya. Masyarakat Transparansi Indonesia (<http://www.transparansi.or.id>) mengidentifikasi banyak prinsip *good governance*, seperti tingkat kepedulian pada stakeholder, efektifitas dan

commit to user

efisien, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi. *e-Government* dengan dukungan teknologi informasi yang baik dan pelaksana yang mempunyai integritas dipercaya akan sangat membantu pencapaian *good governance* tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mencari bukti empiris keterkaitan kedua hal ini.

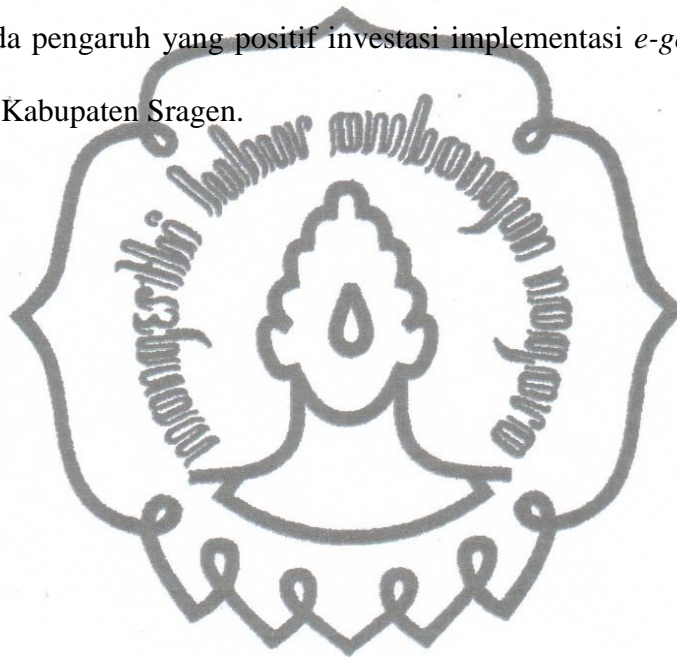
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan Gambar 1. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilakukan analisis pengaruh investasi e government terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator PDRB; pelayanan kependudukan dan investasi di Kabupaten Sragen



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Hipotesa

1. Ada pengaruh yang positif investasi implementasi *e-governmant* terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen.
2. Ada pengaruh yang positif investasi implementasi *e-governmant* terhadap jumlah investasi swasta di Kabupaten Sragen.
3. Ada pengaruh yang positif investasi implementasi *e-governmant* PDRB di Kabupaten Sragen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus Investasi *e-Government* terhadap Pelayanan Kependudukan dan Perekonomian di Kabupaten Sragen. Studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang terkait pada latar belakang dan kondisi subyek yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tersebut (Arikunto, 2006).

B. Unit Analisis

Data – data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah investasi implementasi e-govermant; PDRB; pelayanan kependudukan; dan investasi di Kabupaten Sragen tahun 2008 – 2010.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen, khususnya pada :

1. Kantor Pengelola Data Elektronik merupakan badan pemerintah yang secara khusus menjadi penanggung jawab atas penerapan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sragen

commit to user

2. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menerapkan *e-Government* yang baik, terbukti dari seringnya Pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya itu. Tidak hanya itu, penerapan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Sragen juga menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan *e-Government* di daerah mereka.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer : merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data.
2. Data Sekunder : adalah informasi yang telah diterima oleh pihak lain. Jadi dalam hal ini peneliti tidak secara langsung memperoleh data dari sumbernya, data-data sekunder yang digunakan antara lain:
 - a. Investasi implementasi e-govermant di Kabupaten Sragen dengan data bulanan selama 3 tahun (2008-2010), sehingga jumlah data yang diolah sebanyak 36 (3 x 12) data, yang diperoleh dari Pemda Sragen.
 - b. PDRB Kabupaten Sragen dengan data bulanan selama 3 tahun (2008-2010), sehingga jumlah data yang diolah sebanyak 36 (3 x 12) data, yang diperoleh dari BPS Sragen.
 - c. Pelayanan kependudukan diambil dari jumlah pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat yaitu (1) Kartu Tanda Penduduk (2) Akta Kelahiran (3) Akta Perkawinan (4) Akta Perceraian (5) Akta

Pengakuan dan Pengesahan Anak (6) Akta Pengangkatan Anak (7) Akta Perubahan / Ganti Nama (8) Akta Kematian dan (9) Kutipan Akta Kedua di Kabupaten Sragen dengan data bulanan selama 3 tahun (2008-2010), sehingga jumlah data yang diolah sebanyak 32 (3×12) data, yang diperoleh dari Pemda Sragen.

- d. Investasi di Kabupaten Sragen dengan data bulanan selama 3 tahun (2008-2010), sehingga jumlah data yang diolah sebanyak 36 (3×12) data, yang diperoleh dari Pemda Sragen.

E. Definisi Operasional

1. Investasi implementasi e-governant : Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembang e – governant di Kabupaten Sragen dihitung dengan rupiah..
2. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen dihitung dengan rupiah.
3. Pelayanan Kependudukan : Jumlah pelayanan kependudukan (1) Kartu Tanda Penduduk (2) Akta Kelahiran (3) Akta Perkawinan (4) Akta Perceraian (5) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak (6) Akta Pengangkatan Anak (7) Akta Perubahan / Ganti Nama (8) Akta Kematian dan (9) Kutipan Akta Kedua.
4. Investasi : jumlah penanaman modal investasi di Kabupaten Sragen dihitung dengan rupiah.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear

Untuk menjawab perumusan masalah, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana. Persamaan yang digunakan adalah :

$$PK = a_0 + a_1 I_{e-Gov} + e_1$$

$$I_{Usaha} = b_0 + b_1 I_{e-Gov} + e_2$$

$$PDRB = c_0 + c_1 I_{e-Gov} + e_3$$

keterangan :

a_0, b_0 dan c_0 = konstanta

I_{e-Gov} = Investasi implementasi e- government

PK = Pelayanan Kependudukan

I_{Usaha} = Investasi Usaha

PDRB = PDRB

e = error

a. Uji statistik “t”

Uji ini mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya, jika t hitung $< t$ tabel, maka tidak terdapat hubungan/pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2009).

b. Uji statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan/pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X_n terhadap variabel Y , dan juga untuk mengetahui ketepatan pendekatan atas alat analisis. Adapun tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh R^2 yang besarnya berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. Makai besar nilai R^2 berarti makin tepat suatu garis regresi linear yang digunakan sebagai pendekatan. Apabila nilai R^2 sama dengan 1 maka pendekatan itu benar-benar sempurna (Ghozali, 2009).

2. Uji Asumsi Klasik

Model pengujian hipotesi berdasarkan analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan nilai parameter yang sah. Asumsi klasik tersebut antara lain normalitas data dan tidak terdapat adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas dan otokorelasi.

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel indenpenden. Kondisi ini harus dihindari agar hasil pengujian tidak bias. Apabila terjadi hubungan linier antar variabel indenpenden maka :

- 1) Koefisien regresi dari variabel bebas tidak bisa diestimasi
- 2) Rentang dari tingkat keyakinan menjadi semakin lebar
- 3) Oleh karena antar variabel indenpenden berhubungan, tidak mungkin kita memisahkan variabel secara individual.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *varian inflation factor* (*VIF*) yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Kreteria terjadinya multikolinearitas adalah apabila *VIF* lebih besar 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai *VIF* dibawah 10 maka model regresi tidak mengandung multikolinearitas (Ghozali, 2009).

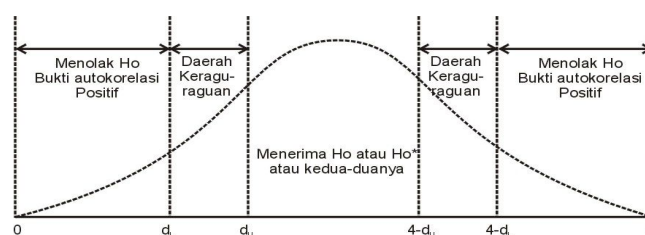
b. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian faktor pengganggu (*error*) yang terjadi dalam model regresi bersifat tidak sama atau tidak konstan. Oleh karena itu, suatu model regresi harus terpenuhi dari factor pengganggu ini. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka sekalipun sampel diperbesar standart error tidak minimum, sehingga estimasi OLS tidak efisien. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji

dengan metode *Korelasi Spearman's rho* antara nilai residu (*disturbance error*) dari hasil regresi dengan masing-masing variabel independennya. Kreteria ada tidaknya gejala Heteroskedastisitas adalah apabila nilai korelasi spearman's rho dibawah **0,7** berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai korelasi Spearman's rho diatas 0.7 berarti model regresi menunjukkan adanya permasalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

c. Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar waktu. Pengujian otokorelasi akan dilakukan berdasarkan pada nilai Durbin Watson-nya. Jika $DW \text{ Uper} < DW \text{ Statistik} < 4 - DW \text{ Uper}$ maka model regresi bebas dari permasalahan otokorelasi. Sebaliknya, jika $DW \text{ Statistik} < DW \text{ Uper}$ atau $DW \text{ Statistik} > 4 - DW \text{ lower}$ maka model regresi mengandung masalah otokorelasi (Ghozali, 2009).



Gambar 2

Gambar Uji Durbin-Watson

Sebagai gambaran dari daerah diterima dan ditolak, untuk uji ini dapat ditunjukkan pada gambar uji Durbin Watson ditunjukkan Gambar 2.

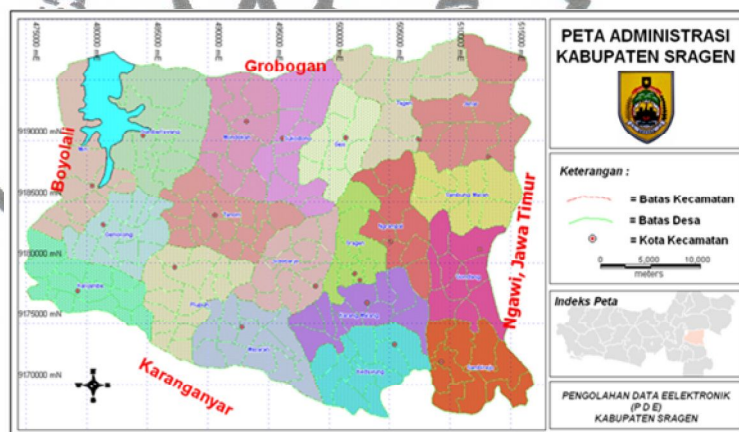
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih tepatnya berada pada koordinat $7^{\circ} 15' \text{LS}$ dan $7^{\circ} 30' \text{LS}$ serta $110^{\circ} 45' \text{BT}$ dan $111^{\circ} 10' \text{BT}$.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sragen

Batas batas wilayah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur)
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Kedaaan Alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari

timur ke barat terletak di sebelah utara bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol dan mediteran. Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 109 mdpl.

Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19-31 ° C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kalurahan, dan 200 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen. Kecamatan tersebut adalah 1) Gemolong, 2) Ngrampal, 3) Plupuh, 4) Sambirejo, 5) Sambungmacan, 6) Sragen, 7) Sidoharjo, 8) Sukodono, 9) Sumberlawang, 10) Tangen, 11) Tanon, 12) Gesi, 13) Gondang, 14) Jenar, 15) Kalijambe, 16) Karangmalang, 17) Kedawung, 18) Masaran, 19) Miri dan 20) Mondokan.

2. Kependudukan

▪ Penduduk

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2009 sebanyak 875.423 jiwa, terdiri dari 432,983 penduduk laki laki dan 442.480 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata rata 929,86 jiwa/km². Perkembangan penduduk mulai tahun 2002 sampai 2009 berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan

Tabel 4.2, jumlah penduduk dan kepadatan tiap kecamatan ditunjukkan Tabel 4.3.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2002-2009

JENIS DATA	2002 (jiwa)	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)
Jenis Kelamin								
Laki-laki	421.167	422.217	422.948	424.577	426.096	429.839	431.191	432.983
Perempuan	430.416	431.494	432.296	433.689	435.893	439.563	440.760	442.480
Total	851.583	853.711	855.244	858.266	861.989	869.402	871.951	875.463

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Pertumbuhan penduduk Sragen semakin meningkat dari Tahun 2002 hingga tahun 2009. Dapat dilihat pada tahun 2002, jumlah penduduk total laki-laki dan perempuan sebanyak 851.583 jiwa dan pada tahun 2009 sebanyak 875.463 jiwa. Dari Tabel 4.1 juga diketahui jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, pada tahun 2009 diketahui ada sebanyak 442.480 penduduk perempuan dan sebanyak 432.983 penduduk laki-laki.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Tahun 2002-2009

JENIS DATA	2002 (jiwa)	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)
0 - 4 Tahun	69.197	69.372	69.501	84.859	70.027	70.551	70.848	71.170
5 - 14 Tahun	250.910	251.531	252.023	251.721	210.052	162.568	163.221	163.963
15 - 64 Tahun	438.587	439.685	440.466	434.528	487.833	573.333	575.168	577.783
64 Tahun ke atas	92.889	93.123	93.254	87.158	94.077	62.030	62.264	62.547
Total	851.583	853.711	855.244	858.266	861.989	868.482	871.501	875.463

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Jumlah penduduk Sragen pada tahun 2002 sampai tahun 2009 berdasarkan Tabel 4.2 paling banyak yang berada di usia 15-64 tahun. Pada tahun 2009, penduduk Sragen yang berusia 15-64 tahun ada sebanyak 577.783 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Sragen memiliki banyak penduduk di usia produktif sehingga memiliki potensi masyarakat untuk lebih produktif.

Tabel 4.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Tiap Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (/Km ²)
Kalijambe	46,96	46,400	988.07
Plupuh	48,36	46,286	957.11
Masaran	44,04	65,661	1490.94
Kedawung	49,78	59,697	1199.22
Sambirejo	48,43	37,074	766.31
Gondang	41,17	43,617	1059.44
Sambungmacan	38,48	44,026	1144.13
Ngrampal	34,40	36,427	1058.92
Karangmalang	42,98	58,089	1352.48
Sragen	27,27	65,673	2408.25
Sidoharjo	45,89	51,169	1115.04
Tanon	51,00	54,797	1074.45
Gemolong	40,23	46,956	1167.19
Miri	53,81	32,532	604.57
Sumberlawang	75,16	45,543	605.95
Mondokan	49,36	34,267	694.23
Sukodono	45,55	31,451	690.47
Gesi	39,58	21,840	551.79
Tangen	55,13	27,101	491.58
Jenar	63,97	26,857	419.84
TOTAL	941,55	875,463	929.86

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Kepadatan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2009 rata-rata sebesar 929,86 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan beragam mulai dari 419,84 (Kecamatan Jenar) sampai 2408,25 jiwa/km² (Kecamatan Sragen).

▪ Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya (Tabel 4.4).

Tabel 4.4
Banyaknya Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2009.

No	Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha	Mata Pencaharian Warga			
		2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	243.867 (17.81%)	144.898 (11.37%)	204.000 (15.32%)	197.588 (14.91%)
2	Pertambangan dan penggalian	564.000 (41.19%)	566.000 (44.41%)	565.000 (42.43%)	565.000 (42.63%)
3	Industri pengolahan	26.565 (1.94%)	26.677 (2.09%)	26.621 (2.00%)	26.623 (2.01%)
4	Listrik , gas dan air	327.000 (23.88%)	329.000 (25.81%)	328.000 (24.63%)	328.300 (24.77%)
5	Bangunan	22.615 (1.65%)	22.177 (1.74%)	22.396 (1.68%)	22.397 (1.69%)
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	64.395 (4.70%)	64.667 (5.07%)	64.531 (4.85%)	64.533 (4.87%)
7	Angkutan, penggudangan dan komunikasi	5.966 (0.44%)	5.991 (0.47%)	5.979 (0.45%)	5.923 (0.45%)
8	Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan	2.198 (0.16%)	2.207 (0.17%)	2.203 (0.17%)	2.233 (0.17%)
9	Jasa kemasyarakatan	112.533 (8.22%)	113.008 (8.87%)	112.771 (8.47%)	112.776 (8.51%)
Jumlah		1369.139	1274.625	1331.501	1325.373

Sumber : BPS Sragen Januari 2010

Penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian mencapai 42,63% pada tahun 2009, dan yang paling sedikit pada sektor keuangan, asuransi, usaha sewa

bangunan, tanan dan jasa perusahaan yang hanya 0,17%.

Ketenagakerjaan penduduk tahun 2002 – 2009 di Kabupaten Sragen

ditunjukkan Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Ketenagakerjaan Tahun 2002 – 2009

NO	Ketenagakerjaan	Satuan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Penduduk 15 tahun keatas	orang	623.001	624.543	625.623	-	-	643.738	645.096
2	Angkatan Kerja	orang	373.371	415.787	450.962	463.301	-	457.210	458.175
3	Setengah Penganggur	orang	244.599	276.421	290.408	-	-	279.358	279.947
4	Penganggur Terbuka	orang	39.730	32.052	7.883	8.665	3.263	6.684	6.544
5	TKI Diluar Negeri	orang	850	1.323	1.727	1.752	602	6.566	6.896
6	PHK	kasus	35	33	10	14	1	5	6
7	Jumlah TK PHK	orang	174	1.111	12	34	1	5	6
8	Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	rupiah	386.470	411.353	426.158,75	489.141	604.017	643.025	721.103
9	Rata-rata Upah Minimum	rupiah	316.850	357.500	382.500	406.000	485.000	550.000	608.000
10	Pencari Kerja Terdaftar di Disnakertrans	orang	9.105	8.961	8.871	8.665	7.132	6.746	6.544
	Penduduk 15 tahun keatas	orang	623.001	624.543	625.623	-	-	643.738	645.096

Sumber : Disnakertrans 2010

3. Visi dan Misi Kabupaten Sragen

▪ Visi

Visi kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2011 yaitu **“SRAGEN MENJADI KABUPATEN CERDAS”**. Kabupaten Sragen terdepan dalam inovasi pemerintahan yang membangun kepercayaan rakyat, menuju Sragen Sejahtera. Penjabaran pemikiran dari visi tersebut

▪ Misi

commit to user

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen adalah **"MEWUJUDKAN RAKYAT YANG UNGGUL, PRODUKTIF, DAN SEJAHTERA"**. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaannya serta fungsi dan peranannya dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi hendaknya mampu :

- (1) Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi.
- (2) Memberi petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- (3) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen

Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 telah menetapkan Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan daerah dibidang data elektronik. Kantor Pengelola Data Elektronik diberi tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan serta pengolahan data elektronik. Pengembangan sistem teknologi informasi di Kabupaten Sragen merupakan pedoman menuju terciptanya Kabupaten Sragen sebagai *cyber*
commit to user

regency. Pada tahun 2007 semua satuan kerja, kecamatan, BUMD, desa/kelurahan, sudah terjangkau jaringan sistem informasi yang terintegrasi secara *on-line*. Dengan adanya sistem *on-line* tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan membiasakan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kantor Pengelola Data Elektronik merupakan satuan kerja yang bertindak sebagai *backup* dan *support* bagi satuan kerja lain, khususnya di bidang administrasi, manajemen pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian peran yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik menjadi sangat penting, karena diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan semua satuan kerja lain. Dengan peranan tersebut, Kantor Pengelola Data Elektronik dituntut untuk selalu siap melayani, mendukung, dan membantu kelancaran tugas – tugas di bidang administrasi data, manajemen pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.

Visi Bagian Kantor Pengelola Data Elektronik yang ingin dicapai adalah: “Terwujudnya Sragen Sejahtera didukung Sistem Informasi Yang Terintegrasi Dengan Dilandasi Hasil Kajian Kegiatan dan Penelitian yang Akurat”. Sedangkan misi yang ingin diwujudkan adalah :

- 1) Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal melalui jaringan Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi secara *Online*.
- 2) Terwujudnya kualitas SDM yang Handal berwawasan IPTEK
- 3) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi Yang Efektif.

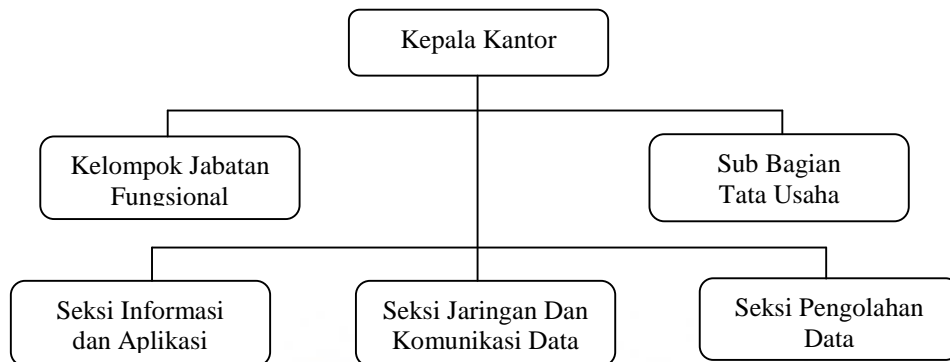
- 4) Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Akurat dan *Applicable*.

Dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan utama mewujudkan Sragen *Cyber Regency*, dimana semua *stake holder* pembangunan daerah di Kabupaten Sragen mendapatkan akses, bisa berinteraksi dan berpartisipasi melalui jaringan informasi yang terintegrasi dalam rangka menunjang system manajemen pemerintahan *e-Government* yang demokratis, transparan dan akuntabel menuju masyarakat sragen sejahtera.

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemkab Sragen terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Informasi dan Aplikasi.
4. Seksi Jaringan Dan Komunikasi Data.
5. Seksi Pengolahan Data.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.2
Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja
Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang data elektronik.

b. Fungsi

Kantor Pengelola Data Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang data elektronik.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan data elektronik.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kondisi Kepegawaian

Kantor Pengelola Data Elektronik terdiri dari 36 orang dengan berbagai macam kualifikasi pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 4.6.

Menurut tabel tersebut terdapat 4 tingkatan pendidikan pegawai yang bekerja di Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen. Tingkat pendidikan tertinggi pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik adalah master sedangkan pendidikan terendah adalah SMA. Untuk tingkat sarjana terbagi menjadi komputer dan non komputer. Jumlah untuk master 5 orang, sarjana 23 orang, diploma 4 orang, sedangkan untuk tingkat SMA berjumlah 3 orang.

Tabel 4.6

Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen
Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	5
S1 Non Komputer	1
S1 Komputer/Elektro	23
D3 Komputer	4
SMA	3
Jumlah	36 Orang

Sumber: Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen (2011)

Pembagian pegawai menurut jabatan dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen
Menurut Tingkat Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala	1
Kepala Sub Bagian	1
Kepala Seksi	3
Pelaksana	31
Jumlah	36 Orang

Sumber: Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen (2011)

Menurut tabel diatas terdapat satu orang kepala kantor, satu orang kasubag, tiga orang kepala seksi dan tiga puluh satu pelaksana. Sedangkan pembagian kondisi pegawai menurut pangkat dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 4.8.

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui jumlah pegawai paling banyak berada di golongan IIIA-Penata Muda.

Tabel 4.8
Keadaan Pegawai Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen
Menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat-Golongan/Ruang	Jumlah
Penata Tingkat I – III D	1
Penata – III C	2
Penata Muda Tingkat I – III B	7
Penata Muda – III A	23
Pengatur Tingkat I – II D	1
Pengatur Tingkat – II C	1
Pengatur Muda – II A	1
Jumlah	36 Orang

Sumber: Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen (2011)

Kemudian golongan IIID-Penata Tingkat I satu orang, golongan IIIC-Penata dua orang, golongan IIIB-Penata Muda Tingkat I dengan jumlah tujuh orang. Selanjutnya golongan, IIC-Pengatur IIA Pengatur Muda dan IID-Pengatur Tingkat I masing-masing berjumlah satu orang pegawai.

d. Produk-Produk yang telah dihasilkan.

Berikut adalah produk-produk yang dihasilkan KPDE Sragen

1) Jaringan Online 24 jam

Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari 7 hari seminggu pada semua Satuan kerja, Kecamatan, Desa/Kelurahan, BUMD, Instansi Vertikal, Puskesmas, dan Jaringan Pendidikan.

2) Aplikasi / Sistem Informasi

- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - KANTAYA (Kantor Maya)
- SIM Perijinan Terpadu
- SIPAW (Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah)
- SIM Kepegawaian
- SIM Keuangan Daerah
- SIM Kependudukan (SIK)
- SIM Pertanahan
- Billing System RSUD
- Sistem Informasi Strategis (SISTRA)

commit to user

- SIM Pendapatan Daerah
- SIM Pengelolaan Barang Daerah
- GIS (Sistem Informasi Geografis)
- SIM BPR/BKK
- Billing System PDAM
- SIM Pengadaan Barang/jasa
- Surat Maya

3) Kantaya (Kantor Maya)

Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antar seluruh pegawai Pemkab Sragen

- Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
- Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
- Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap Satker
- Agenda Kerja pada setiap Satker
- Forum Diskusi dan Chating antar Personil dan Satker
- Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker

4) Kemampuan dan Jasa Layanan IT

- Kerjasama assistensi teknis pengembangan IT dengan daerah lain
- Konsultan pembangunan dan pengembangan jaringan online

5) Hardware Services :

- Memperbaiki *hardware* yang bermasalah dari satker yang ada dilingkungan Pemkab Sragen.

6) Pembuatan Dan Pengembangan WebSite.

Untuk menjawab tantangan globalisasi serta meraih peluang yang menguntungkan pada masa yang akan datang, kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di buat pula Website Pemda Sragen : [http:// www.sragenkab.go.id](http://www.sragenkab.go.id) dan beberapa sub domain, antara lain : PDE Sragen, Marketing dan Investasi, Humas, Badan Pelayanan Terpadu, dan akan masih banyak lagi.

C. Analisis Diskriptif

1. Investasi *e-governmant*

Tabel 4.9 menunjukkan investasi yang digunakan untuk mengembangkan *e-governmant* di Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010 yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Data Elektronik.

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai investasi yang digunakan Pemkab. Sragen untuk pelaksanaan dan pengembangan *e-governmant* di lingkungan Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi. Selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 rata – rata investasi untuk *e-governmant* sebesar Rp 7.628.205,00 dengan nilai minimum sebesar Rp. 6.275.120,00 dan nilai investasi terbesar sebesar Rp 9.127.490,00.

Tabel 4.9
Investasi *e-Government* di Kabupaten Sragen
Tahun 2008 – 2010

Periode	Jumlah Investasi e-Gov. (Rupiah)
Januari 2008	Rp 7.967.366,00
April 2008	Rp 8.589.334,00
Agustus 2008	Rp 8.409.954,00
Desember 2008	Rp 8.499.644,00
April 2009	Rp 7.883.548,00
Agustus 2009	Rp 6.765.280,00
Desember 2009	Rp 8.768.715,00
April 2010	Rp 7.213.008,00
Agustus 2010	Rp 8.948.096,00
Desember 2010	Rp 9.127.488,00
Rata – Rata	Rp 7.628.205,00
Minimum	Rp 6.275.120,00
Maksimum	Rp 9.127.490,00

Sumber: Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen (2011)

2. Investasi Usaha

Tabel 4.10 menunjukkan investasi usaha yang dilakukan pengusaha di lingkungan Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai investasi usaha di wilayah Sragen mengalami fluktuasi. Selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 rata – rata investasi usaha sebesar Rp78.018.195.149,83 dengan nilai minimum sebesar Rp 3.471.000.000,00 dan nilai investasi terbesar sebesar Rp 709.486.000.000,00.

Tabel 4.10
Investasi Usaha di Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2010

Periode	Jumlah Usaha (Rupiah)
Januari 2008	Rp 5.490.000.000,00
April 2008	Rp 709.486.000.000,00
Agustus 2008	Rp 17.373.084.920,00
Desember 2008	Rp 14.593.367.483,00
April 2009	Rp 3.471.000.000,00
Agustus 2009	Rp 9.381.491.723,00
Desember 2009	Rp 124.814.250.000,00
April 2010	Rp 17.472.555.000,00
Agustus 2010	Rp 6.316.300.000,00
Desember 2010	Rp 18.995.711.612,00
Rata – Rata	Rp 78.018.195.149,83
Minimum	Rp 3.471.000.000,00
Maksimum	Rp 709.486.000.000,00

Sumber: Kantor Pengelola Data Elektronik Pemkab Sragen (2011)

3. PDRB

PDRB per kapita Kabupaten Sragen berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 6.709.327,70 sedangkan pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 7.606.240,32 atau ada kenaikan sebesar Rp. 896.912,62 atau sebesar 13,37 %, sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2009 sebesar Rp. 3.306.501,87 dan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 3.490.393,98 atau ada kenaikan sebesar Rp. 183.892,11 atau naik sebesar 5,56 %.



Gambar 4.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Sragen

4. Pelayanan Kependudukan

Pelayanan kependudukan dari jumlah pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat yaitu (1) Kartu Tanda Penduduk (2) Akta Kelahiran (3) Akta Perkawinan (4) Akta Perceraian (5) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak (6) Akta Pengangkatan Anak (7) Akta Perubahan / Ganti Nama (8) Akta Kematian dan (9) Kutipan AKta Kedua di Kabupaten Sragen selama 3 tahun (2008-2010) ditunjukkan Tabel 4.11 berikut ini.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui dengan adanya layanan *e-governmant* pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 – 2010 rata – rata sebesar 16.597 buah/bulan dengan pelayanan minimum sebesar 10.765 dan pelayanan maksimum sebesar 35.704.

Tabel 4.11
 Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Sragen
 Tahun 2008 – 2010

NO	Periode	Pelayanan Kependudukan
		(buah)
1	2008_01	10.765
2	2008_02	11.467
3	2008_03	11.469
4	2008_04	12.241
5	2008_05	12.421
6	2008_06	14.891
7	2008_07	15.265
8	2008_08	15.503
9	2008_09	15.865
10	2008_10	16.348
11	2008_11	16.384
12	2008_12	12.475
13	2009_01	12.743
14	2009_02	12.963
15	2009_03	13.155
16	2009_04	13.566
17	2009_05	14.115
18	2009_06	14.233
19	2009_07	14.241
20	2009_08	14.432
21	2009_09	16.490
22	2009_10	16.509
23	2009_11	16.946
24	2009_12	17.111
25	2010_01	17.236
26	2010_02	17.370
27	2010_03	17.823
28	2010_04	18.161
29	2010_05	18.499
30	2010_06	19.714
31	2010_07	19.894
32	2010_08	20.018
33	2010_09	21.344
34	2010_10	23.048
35	2010_11	27.098
36	2010_12	35.704
Rata-rata		16.597
Minimum		10.765
Maksimum		35.704

Sumber: BPT Kab. Sragen (2011)

commit to user

D. Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi.

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (Ghozali, 2009)

- 1) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji normalitas dengan metode *kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui:

- 1) Untuk variabel pelayanan kependudukan (KTP) Nilai $Z_{\text{Kolmogorov-Smirnov}}$ sebesar 1,009 dengan *Asymp. Sig* sebesar 0,261. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk

commit to user

mengukur pengaruh investasi *e-governmant* terhadap peyanaan kependudukan memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$ untuk residual variabel dependen memiliki nilai dibawah Z_{tabel} (1,96) atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normal Dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

		RES_KTP	RES_inves	RES_PDRB
N		36	36	36
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000	.0000441	.0000000
	Std. Deviation	3048.83617931	1587705683 82.8555000	189164.7492 8537
Most Extreme Differences	Absolute	.168	.332	.159
	Positive	.168	.332	.159
	Negative	-.139	-.194	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		1.009	1.018	.952
Asymp. Sig. (2-tailed)		.261	.073	.325

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : *output* pengolahan data primer dengan SPSS (2011)

- 2) Untuk variabel investasi usaha (inves) Nilai $Z_{\text{Kolmogorov-Smirnov}}$ sebesar 1,018 dengan *Asymp. Sig* sebesar 0,073. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk mengukur pengaruh investasi *e-governmant* terhadap investasi usaha memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$ untuk residual variabel dependen memiliki nilai dibawah Z_{tabel} (1,96) atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.
- 3) Untuk variabel PDRB Nilai $Z_{\text{Kolmogorov-Smirnov}}$ sebesar 0,952 dengan *Asymp. Sig* sebesar 0,325. Berdasarkan hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk mengukur pengaruh investasi *e-governmant* terhadap PDRB memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$ untuk residual variabel dependen memiliki nilai dibawah Z_{tabel} (1,96) atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 (Ghozali, 2009).

Tabel 4.13
Nilai VIF dan Tolerance Dari Uji Multikolinieritas

Variabel		Collinearity Statistics	
Bebas	Terikat	Tolerance	VIF
Investasi <i>e-governmant</i>	Pelayanan Kependudukan	1,000	1,000
	Investasi Usaha	1,000	1,000
	PDRB	1,000	1,000

Sumber : *output* pengolahan data primer dengan SPSS (2011)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditunjukkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa semua nilai VIF jauh dibawah 10, dan nilai

tolerance diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan bantuan SPSS dilakukan dua tahap, yaitu menghitung nilai residual absolutnya terlebih dahulu baru menghitung korelasi antara nilai variabel dengan nilai residual. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data – data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikansinya (dalam hal ini ditetapkan $\alpha = 5\%$). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari α (5%), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut.

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini :

Tabel 4.14

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel		Statistics uji	
Bebas	Terikat	t hitung	Sig
Investasi <i>e-governmant</i>	Residual Pelayanan Kependudukan	1,934	0,061
	Residual Investasi Usaha	1,080	0,074
	Residual PDRB	0,858	0,397

Sumber : *output* pengolahan data primer dengan SPSS (2011)

Dari data – data diatas dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

commit to user

d. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji autokorelasi, dari tabel tersebut dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,841 – 2,349 yang berarti lebih besar dari 1,650 dan kurang dari 2,350. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel		DW	Ket
Bebas	Terikat		
Investasi <i>e-governmant</i>	Pelayanan Kependudukan	2,349	Bebas Autokorelasi
	Investasi Usaha	1,841	Bebas Autokorelasi
	PDRB	1,880	Bebas Autokorelasi

Sumber : *output* pengolahan data primer dengan SPSS (2011)

2. Hasil Estimasi Model Analisis

Untuk menguji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh investasi *e-governmant* terhadap pelayanan kependudukan, investasi usaha dan PDRB Kabupaten Sragen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat selengkapnya dalam Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linear dengan
Variabel Bebas Investasi *e-governmant*

Variabel Bebas Investasi <i>e-governmant</i>	Variabel Terikat		
	Pelayanan Kependudukan	Investasi Usaha	PDRB
Constant	-15.778,937	-299.979.386.132	222.163,273
Koefisien Regresi	4.244	49.552.624	804,209
t - Hitung	7,031	2,576	21,473
Sig t	0,000**	0,012**	0,000**
R Square	0,593	0,068	0,931
F hit	49,438	2,485	461,078

Ket : *) Signifikan 5% **) Signifikan 1%

Sumber : *output* pengolahan data primer dengan SPSS (2011)

a. Persamaan regresi

Dari data Tabel 4.16, maka hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$1) PK = -15.778,937 + 4.244 E-gov + e$$

$$2) Inv. = -299.979.386.132 + 49.552.624 E-gov + e$$

$$3) PDRB = 222.163,273 + 804,209 E-gov. + e$$

Keterangan:

$E-gov$ = investasi *e-governmant*

PK = Pelayanan Kependudukan

Inv = Investasi Swasta

PDRB = PDRB atas dasar harga berlaku

b. Uji t

Tabel 4.16 menunjukkan Uji t, untuk variabel bebas investasi *e-governmant*. Dari tabel tersebut dapat diketahui.

- 1) Besarnya dana investasi implementasi *e-governmant* yang digunakan oleh Pemkab. Sragen berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen, hal ini ditunjukkan oleh nilai T_{hitung} sebesar 7,031 dan probabilitas signifikansinya 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Koefisien regresi sebesar 4.244 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan 4.244 buah layanan kependudukan di Kabupaten Sragen.

- 2) Besarnya dana investasi implementasi *e-governmant* yang digunakan oleh Pemkab. Sragen berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi usaha yang berkembang di Kabupaten Sragen, hal ini ditunjukkan oleh nilai T_{hitung} sebesar Besarnya dana investasi implementasi *e-governmant* yang digunakan oleh Pemkab. Sragen berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen, hal ini ditunjukkan oleh nilai T_{hitung} sebesar 2,576 dan probabilitas signifikansinya 0,012 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Koefisien regresi sebesar 49.552.624 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan Rp 49.552.624 investasi usaha yang ditanamkan di Kabupaten Sragen.
- 3) Besarnya dana investasi implementasi *e-governmant* yang digunakan oleh Pemkab. Sragen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sragen, hal ini ditunjukkan oleh nilai T_{hitung} sebesar 21,473 dan probabilitas signifikansinya 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Koefisien regresi sebesar 804,209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan Rp 804,209 PDRB Kabupaten Sragen.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 4.16, memperlihatkan hasil Uji R^2 , dari tabel tersebut didapatkan hasil:

- 1) Nilai R^2 sebesar 0,593 atau 59,3 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat pelayanan kependudukan menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 59,3% jumlah pelayanan kependudukan, sedangkan sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.
- 2) Nilai R^2 sebesar 0,068 atau 6,8 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat investasi usaha menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 6,8 % jumlah investasi usaha, sedangkan sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.
- 3) Nilai R^2 sebesar 0,931 atau 93,1 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat PDRB menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 93,1% PDRB, sedangkan sisanya sebesar 0,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

d. Keputusan uji

- 1) Besarnya dana yang digunakan untuk investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen.
- 2) Besarnya dana yang digunakan untuk investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi usaha yang ditanamkan di Kabupaten Sragen.
- 3) Besarnya dana yang digunakan untuk investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sragen.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan

Pengujian hipotesis pertama yaitu ada pengaruh investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen menggunakan analisis regresi linear menunjukkan hasil besarnya investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen. Dengan demikian **hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti.**

Koefisien regresi sebesar 4.244 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan 4.244 buah
commit to user

layanan kependudukan di Kabupaten Sragen. Nilai R^2 sebesar 0,593 atau 59,3 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat pelayanan kependudukan menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 59,3% jumlah pelayanan kependudukan, sedangkan sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap Jumlah Investasi Swasta

Pengujian hipotesis pertama yaitu ada pengaruh investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh terhadap jumlah investasi di Kabupaten Sragen menggunakan analisis regresi linear menunjukkan hasil besarnya investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah investasi usaha yang ditanamkan di Kabupaten Sragen. Dengan demikian **hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti.**

Koefisien regresi sebesar 49.552.624 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan Rp 49.552.624 investasi usaha yang ditanamkan di Kabupaten Sragen. Nilai R^2 sebesar 0,068 atau 6,8 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat investasi usaha menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 6,8 % jumlah investasi usaha, sedangkan sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

3. Pengaruh Investasi e-Government Terhadap PDRB

Pengujian hipotesis pertama yaitu ada pengaruh investasi implementasi *e-governmant* terhadap PDRB Kabupaten Sragen menggunakan analisis regresi linear menunjukkan hasil besarnya investasi implementasi *e-governmant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sragen. Dengan demikian **hipotesis ketiga dalam penelitian ini terbukti.**

Koefisien regresi sebesar 804,209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan investasi *e-governmant* dapat meningkatkan Rp 804,209 PDRB Kabupaten Sragen. Nilai R^2 sebesar 0,931 atau 93,1 %, untuk variabel bebas investasi *e-governmant* dan variabel terikat PDRB menunjukkan bahwa investasi *e-governmant* dapat menjelaskan 93,1% PDRB, sedangkan sisanya sebesar 0,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Investasi implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen.
2. Investasi implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap jumlah investasi di Kabupaten Sragen.
3. Investasi implementasi *e-government* berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten Sragen.

B. Saran

Perbaiki sistem ataupun perbaikan implementasi dari sebuah kebijakan diperlukan agar penerapan kebijakan benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, investasi pada pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sragen dapat meningkatkan :

1. Pelayanan kependudukan di Kabupaten Sragen,
2. Jumlah investasi di Kabupaten Sragen, dan
3. PDRB di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, pemeliharaan dan investasi untuk pelaksanaan *e-government* dapat berpengaruh positif pada ketiga hal tersebut diatas. Untuk itu beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan, pemberian kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sragen maka: kemajuan teknologi yang begitu cepat perlu diperhatikan secara khusus oleh Pemkab Sragen. Peremajaan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan jaman mutlak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Kemampuan SDM yang sesuai dengan kemajuan teknologi juga perlu dimiliki. Sehingga pelatihan secara berkala, kursus-kursus yng mengasah ketrampilan hendaknya terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan pesat teknologi di masa mendatang, sehingga pelayanan-pelayanan kependudukan dapat ditingkatkan lagi dan mempermudah investor dalam menanamkan modalnya di lingkungan Kabupaten Sragen.
3. Inovasi-inovasi dalam imlementasi *e-Government* dibidang lainnya perlu didukung, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan.